

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1968.

Indriyanto Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 1981.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2008.

Jurnal

Andi Hakim Lubis dan Rismanto J. Purba, “Interpretasi Hukum terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam Dinamika Praperadilan di Indonesia”, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Leo Christy Menoha Teslatu, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Raihan Akbar Hidayat, Beni Hidayat, dan Ahmed Hedielloum Kodio, “How Could Judges Ignore the Audi Et Alteram Partem Principle in a Criminal Case Trial?”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Putusan Pengadilan/Petikan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel.

Putusan/Resolusi Organisasi Internasional/Konvensi Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights.

Data Elektronik

M. Rosseno Aji, “Kuasa Hukum Nilai Penetapan Tersangka Delpedro Marhaen
Cacat Prosedur,” terdapat
dalam [https://nasional.tempo.co/read/189999/kuasa-hukum-nilai-
penetapan-tersangka-delpedro-cacat-prosedur](https://nasional.tempo.co/read/189999/kuasa-hukum-nilai-penetapan-tersangka-delpedro-cacat-prosedur), diakses pada 9 Januari 2026
pukul 20.10 WIB.

Sumber Lain

Delpedro Marhaen Rismansyah et al., *Permohonan Praperadilan Perkara Nomor
132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel*, Tim Advokasi untuk Demokrasi, Jakarta,
2025.

Polda Metro Jaya, *Surat Ketetapan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum
Nomor S.Tap/S-4/1539/VIII/2025/Ditreskrimum tentang Penetapan
Tersangka atas Nama Delpedro Marhaen Rismansyah*, Jakarta, 2025.